



Dampak Bantuan Insentif Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Somadi¹, Rosim², Siti N. Amalia Sartika³, Sumarga M. Efendi⁴, Fitri Rahmafritia⁵

Magister Pariwisata Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Korespondensi dengan Penulis: Somadi

E-mail: somadi@iwu.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pariwisata sehingga menyebabkan penurunan penerimaan devisa dan kontribusi ekonomi, penurunan tingkat penghunian kamar, penurunan pendapatan, penutupan usaha, dan dampak lainnya. Untuk menjaga keberlangsungan usaha di sektor pariwisata, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah. Namun penyaluran dan dampak kebijakan tersebut sulit untuk diketahui, karena kurangnya transparansi yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk itu, tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penyaluran dan dampak Bantuan Insentif Pemerintah bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa jumlah Bantuan Insentif Pemerintah yang disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp25.980.947.161,- dengan jumlah penerima sebanyak 232 pelaku usaha, sedangkan jumlah Bantuan Insentif Pemerintah yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 1.000 pelaku usaha. Adapun dampak Bantuan Insentif Pemerintah antara lain yaitu adanya peningkatan keuntungan usaha, adanya penentuan target lokasi, demografi, adanya penyesuaian tren terhadap produk yang ditawarkan, dan dapat bertahan dari kepailitan melalui penutupan biaya operasional usaha pada beberapa bulan kedepan.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19; Pariwisata; Ekonomi Kreatif; Bantuan Insentif Pemerintah; Dampak Kebijakan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a huge impact on the tourism sector, causing a decrease in foreign exchange receipts and economic contributions, a decrease in room occupancy rates, a decrease in income, business closures, and other impacts. To maintain business continuity in the tourism sector, the Government issued a Government Incentive Assistance Policy. However, the distribution and impact of this policy is difficult to know, due to the lack of transparency provided by the Government. For this reason, the aim of this research is to determine the distribution and impact of Government Incentive Assistance for tourism and creative economy entrepreneurs. Based on the results of the analysis, the amount of Government Incentive Assistance distributed in 2020 was IDR 25,980,947,161,- with a total of 232 business actors, while the amount of Government Incentive Assistance distributed in 2021 amounted to IDR 60,000,000,000,- with the number of recipients as many as 1,000 business actors. The impacts of Government Incentive Assistance include increasing business profits, determining location targets, demographics, adjusting trends in the products offered, and being able to survive bankruptcy by covering business operational costs in the next few months.

Keywords: *The Covid-19 Pandemic, Tourist; Creative Economy; Government Incentive Assistance; Impact of Aid*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memegang peran penting pada perekonomian Nasional yang terlihat pada kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa negara. Selain itu, pembangunan sektor pariwisata juga dapat mendorong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data Kemenparekraf, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2019 mencapai sebesar 4,8 persen atau naik sebesar 0,3 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,5 persen. (Wulansari, 2021).

Namun setelah terjadinya pandemi Covid-19, kontribusi sektor pariwisata tersebut mengalami penurunan yang signifikan bagi perekonomian Nasional. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi semua sektor, khusus sektor pariwisata Indonesia. Hal ini disebabkan karena pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Kebijakan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat, dan penutupan obyek pariwisata serta kebijakan lainnya dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19 membuat para pelaku usaha di sektor pariwisata harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup dan mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan untuk berkunjung ke hotel, restoran, perdagangan/ industri, dan tempat wisata ataupun penggunaan transportasi.

Pada bulan Januari-April 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 511,44 ribu kunjungan atau menurun sebesar 81,78 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2,81 juta kunjungan (Wulansari, 2021).

Dengan demikian, Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi banyak pelaku usaha dan tenaga kerja di bidang pariwisata. Hotel, restoran, dan tempat wisata mengalami penurunan pendapatan yang tajam, bahkan banyak yang terpaksa menghentikan operasionalnya secara sementara atau permanen. Selain itu, sektor pariwisata mengalami efek domino terhadap industri terkait, seperti transportasi, kerajinan tangan, dan layanan pemandu wisata, serta layanan lainnya yang sangat bergantung pada kunjungan wisatawan.

Pada bulan Oktober 2020 menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai rata-rata 37,48 persen atau turun sebesar 19,29 poin dibandingkan dengan TPK bulan yang sama tahun 2019 sebesar 56,77 persen. Sementara itu, bulan April 2021, TPK mencapai rata-rata 34,63 persen, atau meningkat sebesar 21,96 poin dibandingkan TPK bulan yang sama tahun 2020 sebesar 12,67 persen. Apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2021, TPK pada bulan April 2021 mengalami penurunan sebesar 1,44 poin (Wulansari, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Insentif Pemerintah berupa penambahan modal kerja atau investasi aktivitas tetap. Kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah diharapkan hadir sebagai solusi yang diberikan oleh Pemerintah di tengah wabah pandemi Covid-19, pemulihan sektor pariwisata, dan membantu keberlangsungan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, Bantuan Insentif Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan produksi dari pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran peserta BIP adalah tujuh subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata (Jabar, 2021).

Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia telah dijalankan sejak tahun 2017 oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Kemudian, setelah Bekraf bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini dilanjutkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Bantuan Insentif Pemerintah dibagi menjadi dua kategori yaitu Bantuan Insentif Pemerintah reguler (BIP reguler) dan Bantuan Insentif Pemerintah Jaring Pengaman Usaha (BIP JPU). BIP reguler adalah bantuan insentif Pemerintah yang diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum dengan bentuk PT, Yayasan, Koperasi dan CV bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penambahan modal kerja atau investasi aktiva tetap. Sementara itu, BIP JPU merupakan Bantuan Insentif Pemerintah bagi seluruh badan usaha yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keberlangsungan usaha khususnya akibat efek pandemi Covid-19 melalui penambahan modal kerja atau investasi aktiva tetap.

Besaran uang BIP Reguler yang diterima oleh badan usaha maksimal sebesar Rp200 juta, sedangkan besaran uang BIP JPU yang diterima oleh badan usaha sebesar Rp20 juta. Bantuan yang diberikan Pemerintah ditransfer ke rekening penerima bantuan, yang dapat digunakan untuk penambahan modal kerja, dan investasi aktiva tetap sesuai aturan yang berlaku.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mengalami peningkatan selama tahun 2020 hingga tahun 2021 guna memperluas jangkauan dan dampaknya. Pada tahun 2020, BIP dianggarkan oleh Kemenparekraf sebesar Rp24 miliar lebih, dan pada tahun 2021 Kemenparekraf meningkatkan anggaran BIP menjadi Rp60 miliar, yang mencakup BIP Reguler dan BIP JPU (Widyanti & Prasetya, 2021). Sedangkan informasi mengenai anggaran BIP pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat ditelusuri informasinya. Selain itu, pemberlakuan kebijakan pemberian Bantuan Insentif Pemerintah belum terlihat dengan jelas kesuksesan adanya kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi dari Pemerintah mengenai Bantuan Insentif Pemerintah dan dampak dari penerapan kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah bagi pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif. Untuk itu, tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penyaluran Bantuan Insentif Pemerintah dan dampak Bantuan Insentif Pemerintah bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Bantuan Insentif Pemerintah merupakan salah satu bantuan sosial yang dikeluarkan Pemerintah. Bantuan sosial merupakan bantuan yang bersifat materi maupun non materi yang diberikan kepada masyarakat dengan selektif dan jangka waktu tertentu guna menghindari risiko yang terjadi (Nainah et al., 2022). Sementara itu definisi dari bantuan insentif atau bantuan Pemerintah, adalah jenis bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) dalam bentuk dana uang untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha/produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (Hutomo, 2021a).

Bantuan Insentif Pemerintah terbagi menjadi yaitu BIP reguler dan BIP JPU. BIP Reguler bertujuan untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan atau produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan tujuan BIP JPU untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka dalam rangka membantu keberlangsungan usaha pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya untuk bertahan menghadapi efek pandemi Covid-19 (Hutomo, 2021b). Adapun diagram alir petunjuk teknis BIP Reguler dan BOP JPU adalah sebagai berikut.

METODE

Metode analisis yang digunakan pada penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumentasi/ studi literatur dan wawancara. Adapun sumber data berasal dari penelitian terdahulu, website, dan konten media serta hasil wawancara dengan informan yakni penerima Bantuan Insentif Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Bantuan Insentif Pemerintah

Bantuan Insentif Pemerintah disalurkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 oleh Pemerintah melalui Kemenparekraf. Jumlah Bantuan Insentif Pemerintah yang disalurkan pada tahun 2020 sebesar Rp25.980.947.161 dengan jumlah penerima sebanyak 232 yang tersebar di berbagai jenis usaha, baik pelaku usaha ekonomi kreatif maupun pelaku usaha pariwisata. Sementara itu, Bantuan Insentif Pemerintah disalurkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah melalui Kemenparekraf sebesar Rp60.000.000.000 dengan jumlah penerima ditargetkan sebanyak 1.000 penerima (Widyawanti & Prasetya, 2021).

Tabel 1. Penerima Bantuan Insentif Pemerintah Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Penyaluran (Rp)	Jumlah Penerima	Keterangan
1	Kuliner	6.110.099.000	59	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
2	Pariwisata	3.862.500.000	34	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
3	Fesyen	3.198.033.500	11	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
4	Kriya	3.215.871.000	34	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
5	Film	2.870.082.069	26	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
6	Aplikasi	5.011.792.792	35	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
7	Game	1.712.568.800	33	Pelaku Usaha Pariwisata
Jumlah		25.980.947.161	232	

Sumber: Direktorat Pembiayaan Kemenparekraf, 2020 dalam Andriani (2021)

Dampak Bantuan Insentif Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber penerima Bantuan Insentif Pemerintah bahwa petugas dari Pemerintah sangat kooperatif dan komunikatif dalam penyampaian informasi kepada pelaku usaha terkait dengan Bantuan Insentif Pemerintah seperti informasi persyaratan, proses pengajuan, penilaian/ seleksi, pengumuman penerima bantuan, tata cara pencairan bantuan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban hingga informasi lainnya. Media teknologi dalam hal ini website Bantuan Insentif Pemerintah yang digunakan Pemerintah melalui Kemenparekraf sudah sangat baik. Sehingga penerima Bantuan Insentif Pemerintah merasa puas terhadap seluruh kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Andriani (2021), bahwa pelaku usaha merasa puas terhadap kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah.

Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memberikan respon yang positif terhadap mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang sangat mudah dipahami dan waktu yang diberikan terkait penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Insentif Pemerintah cukup memadai, sehingga para penerima Bantuan Insentif Pemerintah memiliki

waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan segala pelaporan yang dibutuhkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penerima Bantuan Insentif Pemerintah.

Berkaitan dengan nominal bantuan yang diterima, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan respon yang positif bahwa bantuan yang diterima sudah cukup memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Sehingga kebijakan berupa Bantuan Insentif Pemerintah dapat menyelesaikan masalah keuangan selama terjadinya pandemi Covid-19. Dengan demikian, kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah melalui Kemenparekraf sudah tepat sasaran.

Bantuan Insentif Pemerintah memberikan dampak yang besar bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun dampak tersebut membuat pelaku usaha mampu bertahan selama pandemi Covid-19, meningkatkan kapasitasnya, dan lain-lain. Penerima Bantuan Insentif Pemerintah setelah mendapatkan Bantuan Insentif Pemerintah terjadi peningkatan pendapatan dan meningkatkan keuntungan usaha dibandingkan sebelum mendapatkan Bantuan Insentif Pemerintah. Hal ini disebabkan karena setelah menerima BIP, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menjual barang/ jasa telah menentukan target lokasi baik lokal, nasional dan internasional. Kemudian pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga telah menentukan target demografi seperti jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Selain itu juga, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif setelah menerima BIP, mereka mampu menjual barang/ jasa dengan menyesuaikan tren.

Meskipun sebelumnya, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebelum mendapatkan Bantuan Insentif Pemerintah, mereka sudah menentukan target lokasi penjualan barang/ jasa, target demografi, dan menyesuaikan tren. Namun demikian, tindakan tersebut belum maksimal untuk dilaksanakan oleh para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Tindakan tersebut dapat terselenggara secara maksimal setelah mendapatkan BIP dari Pemerintah.

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa informan yakni Pengelola Hotel Santika yang mendapatkan Bantuan Intensif Pemerintah yang diterima pada tahun 2021, bahwa setelah mendapatkan bantuan, kondisi keuangan hotel mulai stabil, karena pengelola hotel bisa menutupi kekurangan biaya gaji karyawan yang dikeluarkan setiap bulannya dan juga dapat menutupi biaya lainnya mengingat bahwa kondisi keuangan saat itu tidak mampu menutupi biaya operasional hotel. Hal ini disebabkan karena Hotel tidak beroperasi selama 3 Bulan ketika terjadinya pandemi Covid-19 dan setelah itu Hotel mulai beroperasi kembali. Namun demikian, Pandemi Covid-19 memberikan pukulan telak bagi karyawan hotel karena karyawan hotel yang habis masa kontraknya tidak bisa dilanjutkan karena pihak pengelola hotel harus menstabilkan keuangan hotel.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tidak hanya Bantuan Insentif Pemerintah, namun juga ada bantuan bagi karyawan berupa bantuan Kartu Pra Kerja bagi yang terkena dampak Pandemi dan PHK, pendaftarannya Mandiri dengan bimbingan dan pengawasan dari perusahaan, Nilai bantuan Insentif yang diberikan sebesar Rp3.550.000,- untuk Pelatihan Rp1.000.000,- Biaya Survei Rp150.000,- bantuan insentif pasca pelatihan selama 4 bulan Rp2.400.000,-. Bantuan diberikan sebanyak 2 kali ke rekening masing-masing karyawan, Hal ini memberikan dampak positif bagi karyawan walaupun besarnya kurang memenuhi kebutuhan mereka, namun sedikitnya bisa membantu menyambung kehidupan atau untuk menambah pendapatan karyawan.

Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Andriani (2021) bahwa kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah efektif membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah yaitu untuk membantu keberlangsungan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kapasitas usaha dan/ atau produksinya (Wulansari, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa jumlah Bantuan Insentif Pemerintah yang disalurkan oleh Pemerintah melalui Kemenparekraf pada tahun 2020 sebesar Rp25.980.947.161,- dengan jumlah penerima sebanyak 232 pelaku usaha, sedangkan jumlah Bantuan Insentif Pemerintah yang disalurkan oleh Kemenparekraf pada tahun 2021 sebesar Rp.60.000.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 1000 pelaku usaha. Dampak kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kemenparekraf antara lain yaitu adanya peningkatan keuntungan usaha, adanya penentuan target lokasi, demografi, adanya penyesuaian tren terhadap produk yang ditawarkan, dan dapat bertahan dari kepailitan melalui penutupan biaya operasional usaha pada beberapa bulan kedepan.

Adapun saran bagi Pemerintah atau Kemenparekraf diharapkan dapat melanjutkan kembali kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah dengan jumlah anggaran dan target sasaran yang lebih besar karena kebijakan memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat baik dan puas mengenai implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah diharapkan adanya transparansi yang dipublikasikan kepada masyarakat dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga terlihat mengenai kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu, saran untuk peneliti selanjutnya yakni dapat menggunakan metode kuantitatif untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah dan dampak kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sebelum adanya penerimaan bantuan dan setelah adanya penerimaan bantuan. Selain itu, lokasi penelitian dapat dipersempit menjadi kota/kabupaten dimana daerah tersebut merupakan daerah penerima bantuan, sehingga akan lebih terlihat secara angka mengenai dampak dari adanya kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. (2021). *Persepsi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terdampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Kebijakan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP)*.
- Hutomo, F. (2021a). Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Reguler. In *Direktorat Akses Pembiayaan Deputy Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* (pp. 1–65). Direktorat Akses Pembiayaan Deputy Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Hutomo, F. (2021b). Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Jaringan Pengaman Usaha (BIP JPU). In *Direktorat Akses Pembiayaan Deputy Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.
- Jabar, T. (2021). Program BIP Salah Satu Bentuk Dukungan Pemulihan Pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Tribun Jabar.Id*, 1.
- Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunisa, N., Ayu, S., Pasaribu, E., Lolita, S., Delia, M., Yuniar, U., Reviyanti, V., & Yulistian, &. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1277–1285.

- Widyanti, N. N. W., & Prasetya, A. W. (2021). Bantuan Insentif Kemenparekraf Dibuka 4 Juni, Ini Cara Daftarnya. *Kompas.Com*, 1.
- Widyawanti, N. N. W., & Prasetya, A. W. (2021). Bantuan Insentif Kemenparekraf Rp60 Miliar Targetkan 1.000 Penerima. *Kompas.Com*, 1.
- Wulansari, R. (2021, September). Bantuan Insentif Pemerintah Sebagai Jurus Andalan Dalam Memulihkan Sektor Pariwisata. *Kementerian Keuangan*, 1.

